

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR SUMATRA BARAT : STUDI LITERATUR

Asma Nadia¹ , Isnaini Febrianti² , Lannida Hasibuan³ , Rilla Indriani⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Dumai, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 2026

Revised January 2026

Accepted January 2026

Available online January 2026

Email:

asmanadia2401@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author.

Abstract

Floods and landslides are recurrent hydrometeorological disasters in West Sumatra Province and have shown increasing impacts in recent years. During the period of December 2024 to January 2025, prolonged extreme rainfall triggered flash floods and landslides in various areas, resulting in substantial human, social, economic, and governance-related losses. This study aims to analyze the impacts of floods and landslides in West Sumatra Province and to examine their implications for regional vulnerability and disaster management policy implementation. The research employs a descriptive qualitative approach using secondary data obtained from official disaster management reports and credible national media publications. The results indicate that the disasters caused significant loss of life, large-scale displacement of residents, and extensive damage to housing, agricultural land, and public facilities. The findings also reveal that the severity of the impacts was not solely driven by natural factors but was strongly influenced by the region's geographical characteristics, environmental degradation, and limitations in the implementation of disaster risk reduction policies at the local level. This study concludes that disaster management efforts in West Sumatra remain predominantly reactive, with greater emphasis on emergency response and post-disaster recovery. Therefore, strengthening preventive measures and integrating disaster risk reduction into regional development planning are essential to reduce the impacts of similar disasters in the future.

Keywords: floods; landslides; disaster management; public policy; West Sumatra

Abstrak

Banjir dan longsor merupakan bencana hidrometeorologi yang terus berulang di Provinsi Sumatera Barat dan menunjukkan peningkatan dampak dalam beberapa tahun terakhir. Pada periode Desember 2024 hingga Januari 2025, curah hujan ekstrem yang berlangsung dalam durasi panjang memicu banjir bandang dan longsor di berbagai wilayah, sehingga menimbulkan kerugian besar dari aspek kemanusiaan, sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Sumatera Barat serta mengkaji implikasinya terhadap kerentanan wilayah dan implementasi kebijakan penanggulangan bencana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari laporan resmi lembaga kebencanaan dan publikasi media nasional yang kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bencana tersebut menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, pengungsian ribuan penduduk, serta kerusakan signifikan terhadap permukiman, lahan pertanian, dan fasilitas umum. Temuan juga mengindikasikan bahwa tingginya dampak bencana tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah, degradasi lingkungan, serta keterbatasan implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana di tingkat daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan bencana di Sumatera Barat masih didominasi oleh pendekatan reaktif, sehingga diperlukan penguatan strategi mitigasi dan integrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah untuk meminimalkan dampak bencana di masa mendatang.

Kata kunci: banjir; longsor; penanggulangan bencana; kebijakan publik; Sumatera Barat.

Pendahuluan

Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang paling dominan terjadi di Indonesia dan terus menunjukkan eskalasi dampak dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan frekuensi hujan ekstrem, perubahan pola iklim, serta degradasi lingkungan telah menjadikan banjir sebagai persoalan struktural yang tidak lagi bersifat insidental. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, banjir menjadi isu strategis karena berdampak langsung terhadap

keselamatan penduduk, stabilitas sosial, keberlanjutan ekonomi daerah, serta kualitas pelayanan publik.

Provinsi Sumatra Barat termasuk wilayah dengan tingkat kerentanan banjir yang tinggi. Secara geografis, wilayah ini berada pada jalur Pegunungan Bukit Barisan dengan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) yang relatif pendek, berlereng curam, dan bermuara langsung ke pesisir barat Sumatra. Kondisi tersebut menyebabkan aliran permukaan berlangsung sangat cepat ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Akibatnya, sungai dan sistem drainase sering kali tidak mampu menampung debit air, sehingga banjir dan banjir bandang menjadi bencana yang berulang hampir setiap tahun.

Selain faktor alam, tingginya kejadian banjir di Sumatra Barat juga dipengaruhi oleh faktor non-alam. Alih fungsi kawasan hutan dan lahan resapan, pembangunan permukiman di sempadan sungai, serta lemahnya pengendalian tata ruang telah memperbesar risiko banjir, khususnya di kawasan padat penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa banjir tidak semata-mata disebabkan oleh curah hujan tinggi, tetapi juga oleh kebijakan pembangunan dan pengelolaan lingkungan yang belum sepenuhnya berbasis pengurangan risiko bencana.

Puncak kerentanan tersebut terlihat jelas pada rangkaian kejadian banjir besar dan banjir bandang yang melanda Sumatra Barat sepanjang tahun 2024 hingga 2025. Beberapa peristiwa bahkan masuk dalam kategori bencana besar nasional karena menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur utama, serta gangguan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dalam skala luas.

Untuk memberikan gambaran empiris mengenai kejadian banjir yang benar-benar terjadi, berikut disajikan rekapitulasi kejadian banjir utama di Provinsi Sumatra Barat tahun 2024-2025 berdasarkan rilis BNPB, BPBD Sumatra Barat, dan pemberitaan nasional arus utama.

Tabel 1 Kejadian Banjir dan Banjir Bandang di Provinsi Sumatra Barat Tahun 2024-2025

Waktu Kejadian	Wilayah Terdampak	Jenis Bencana	Dampak Utama
Maret 2024	Kab. Pesisir Selatan	Banjir	Permukiman terendam, akses jalan terganggu
Mei 2024	Kab. Tanah Datar & Agam	Banjir bandang & longsor	Korban jiwa, rumah rusak, lahan pertanian tertimbun
Mei 2024	Kota Padang & Padang Pariaman	Banjir	Ribuan warga mengungsi, fasilitas publik terganggu
Desember 2024	Kab. Solok Selatan	Banjir	Kerusakan permukiman dan jalan desa
November-Desember 2025	Tanah Datar, Agam, Padang Pariaman	Banjir bandang	Kerusakan besar, korban jiwa, jalur transportasi putus

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa kejadian banjir di Provinsi Sumatra Barat tidak bersifat sporadis, melainkan terjadi secara berulang dengan skala dan dampak yang semakin kompleks. Tahun 2024 ditandai dengan banjir bandang besar pada bulan Mei yang melanda Kabupaten Tanah Datar dan Agam, yang menjadi salah satu peristiwa paling mematikan dalam satu dekade terakhir di Sumatra Barat. Kejadian tersebut menunjukkan lemahnya daya dukung lingkungan serta tingginya kerentanan wilayah hulu dan hilir sungai.

Memasuki akhir tahun 2025, banjir bandang kembali terjadi dengan dampak yang lebih luas. Curah hujan ekstrem yang berlangsung dalam durasi panjang menyebabkan meluapnya sungai-sungai utama, merusak permukiman warga, memutus jalur transportasi antarwilayah, serta memaksa ribuan penduduk untuk mengungsi. Peristiwa ini mempertegas bahwa risiko banjir di Sumatra Barat masih sangat tinggi dan belum dapat ditekan secara signifikan.

Selain menimbulkan korban jiwa dan pengungsian, banjir juga berdampak serius terhadap infrastruktur publik dan sektor produktif masyarakat. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan pada fase darurat, tetapi juga berlanjut pada fase pemulihan yang memerlukan waktu panjang serta biaya besar.

Tabel 2 Jenis Dampak Akibat Banjir di Provinsi Sumatra Barat (2024-2025)

Sektor Terdampak	Bentuk Dampak	Implikasi Jangka Panjang
Permukiman	Rumah terendam dan rusak	Penurunan kualitas hidup masyarakat
Infrastruktur	Jalan dan jembatan putus	Hambatan distribusi barang dan jasa
Pendidikan	Sekolah terdampak banjir	Gangguan proses belajar-mengajar
Kesehatan	Fasilitas layanan terendam	Penurunan akses pelayanan dasar
Pertanian	Sawah dan kebun rusak	Gagal panen dan kerugian ekonomi

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa dampak banjir di Sumatra Barat bersifat multidimensional dan memengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat. Kerusakan infrastruktur menyebabkan terhambatnya mobilitas dan aktivitas ekonomi, sementara terganggunya sektor pendidikan dan kesehatan menurunkan kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, kerusakan lahan pertanian memperbesar kerentanan ekonomi masyarakat perdesaan dan memperlambat proses pemulihan pascabencana.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa banjir tidak hanya merupakan bencana alam, tetapi juga menjadi indikator lemahnya implementasi kebijakan penanggulangan bencana dan pengelolaan lingkungan di tingkat daerah. Meskipun pemerintah telah memiliki kerangka regulasi melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kejadian banjir besar yang berulang menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tersebut masih perlu dikaji secara kritis.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan dukungan data kuantitatif sekunder. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Provinsi Sumatra Barat, serta mengkaji dinamika kebijakan, kelembagaan, dan dampak yang ditimbulkan dari kejadian banjir yang berulang. Penelitian difokuskan pada wilayah Provinsi Sumatra Barat, khususnya daerah-daerah yang mengalami banjir dan banjir bandang pada periode 2024-2025, seperti Kabupaten Tanah Datar, Agam, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, dan Kota Padang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi dan dapat diakses publik. Data utama bersumber dari Data

Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB, laporan resmi BPBD Provinsi Sumatra Barat, serta dokumen kebijakan terkait penanggulangan bencana, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan peraturan turunannya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pemberitaan media nasional yang kredibel, antara lain Kompas, Tempo, dan Antara, untuk memperkuat kronologi dan konteks kejadian banjir tahun 2024-2025. Seluruh data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan penelusuran basis data publik selama tahun 2025.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengintegrasikan data kebencanaan, dokumen kebijakan, dan literatur ilmiah. Data yang terkumpul terlebih dahulu diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian, kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola kejadian banjir, bentuk dampak yang ditimbulkan, serta sejauh mana kebijakan penanggulangan bencana diimplementasikan di tingkat daerah. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi analitis dan tabel deskriptif untuk mempermudah pemahaman dan interpretasi temuan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan membandingkan berbagai sumber data guna menjaga konsistensi dan validitas hasil penelitian.

Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen dan basis data yang tersedia untuk umum, sehingga penelitian ini dapat direplikasi dan dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti lain. Tidak terdapat pembatasan akses terhadap data, dan daftar sumber data dapat disediakan apabila diperlukan.

Hasil dan Pembahasan

Bencana banjir dan longsor yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat pada periode Desember 2024 hingga Januari 2025 merupakan peristiwa bencana hidrometeorologi dengan tingkat dampak yang sangat signifikan. Curah hujan ekstrem yang berlangsung dalam durasi panjang memicu luapan sungai, banjir bandang, serta longsor di berbagai kawasan, sehingga menimbulkan kerugian besar baik dari sisi kemanusiaan, sosial, maupun tata kelola pemerintahan daerah. Bagian ini menyajikan hasil utama berupa data dampak bencana, kemudian membahas makna dan implikasinya secara lebih luas dalam konteks kebijakan dan kerentanan wilayah.

Data hasil pendataan resmi menunjukkan bahwa bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat menimbulkan korban jiwa, korban luka, serta pengungsian dalam jumlah besar. Rekapitulasi dampak kemanusiaan tersebut disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Korban Banjir dan Longsor Provinsi Sumatera Barat (Desember 2024 - Januari 2025)

Indikator	Jumlah
Korban meninggal dunia	234 orang
Korban hilang	95 orang
Korban luka-luka	112 orang
Penduduk mengungsi	3.221 orang

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa jumlah korban meninggal dunia dan penduduk mengungsi menunjukkan skala dampak kemanusiaan yang tinggi. Angka ini menegaskan bahwa bencana yang terjadi bukan sekadar banjir dengan genangan ringan, melainkan peristiwa yang mengancam keselamatan jiwa dan memaksa masyarakat meninggalkan tempat tinggalnya.

Selain dampak kemanusiaan, hasil pendataan menunjukkan bahwa bencana banjir dan longsor juga menyebabkan kerusakan fisik yang signifikan terhadap permukiman dan lingkungan produktif masyarakat. Ringkasan dampak kerusakan fisik disajikan pada Tabel 2. Data tersebut memperlihatkan bahwa ribuan rumah mengalami kerusakan dan puluhan ribu hektare lahan pertanian terdampak, yang secara langsung mengganggu keberlanjutan mata pencaharian masyarakat.

Tabel 2. Dampak Kerusakan Fisik Akibat Banjir dan Longsor di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Jenis Dampak	Jumlah
Rumah rusak dan terdampak	±17.500 unit
Lahan pertanian terdampak	±17.500 hektare
Fasilitas umum terdampak	±339 unit

Kerusakan rumah tidak hanya berarti kehilangan tempat tinggal sementara, tetapi juga berimplikasi pada hilangnya aset ekonomi rumah tangga. Banyak rumah yang rusak berat atau hanyut tidak dapat dihuni kembali tanpa proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang memerlukan waktu lama dan biaya besar. Kondisi ini meningkatkan kerentanan ekonomi masyarakat terdampak, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk pemulihan mandiri.

Kerusakan lahan pertanian dalam skala luas memperlihatkan bahwa bencana juga berdampak pada ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi lokal. Lahan yang terendam atau tertimbun material longsor membutuhkan waktu pemulihan yang panjang sebelum dapat kembali produktif. Dalam jangka pendek, kondisi ini berpotensi menurunkan pendapatan petani dan meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan eksternal.

Besarnya dampak bencana di Sumatera Barat tidak dapat dilepaskan dari kerentanan struktural wilayah. Provinsi ini memiliki karakteristik geografis yang unik, didominasi oleh pegunungan, lembah sempit, serta jaringan sungai dengan kemiringan tinggi. Kombinasi faktor tersebut menyebabkan air hujan dari wilayah hulu mengalir dengan cepat ke daerah hilir, sehingga meningkatkan potensi banjir bandang ketika curah hujan ekstrem terjadi.

Kerentanan ini semakin diperkuat oleh kondisi geologi yang relatif labil di beberapa wilayah, sehingga hujan dengan intensitas tinggi mudah memicu longsor. Dalam konteks ini, bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat merupakan fenomena yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan secara parsial.

Dari sisi sosial, bencana banjir dan longsor memberikan tekanan besar terhadap ketahanan masyarakat. Pengungsian ribuan penduduk dalam waktu yang relatif lama berdampak pada kondisi kesehatan, pendidikan, dan psikologis masyarakat. Anak-anak yang tinggal di pengungsian berisiko mengalami gangguan proses belajar, sementara kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan.

Kondisi pengungsian juga memerlukan pengelolaan logistik dan pelayanan dasar yang memadai. Ketika pengungsian berlangsung lama, tantangan yang muncul tidak hanya bersifat

fisik, tetapi juga sosial, seperti potensi konflik, kelelahan psikologis, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat terdampak.

Hasil dan data yang ada menunjukkan bahwa faktor lingkungan berperan penting dalam memperbesar dampak bencana. Alih fungsi lahan di wilayah hulu, penurunan tutupan vegetasi, serta aktivitas pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan menyebabkan meningkatnya limpasan air permukaan. Ketika hujan ekstrem terjadi, air tidak dapat diserap secara optimal oleh tanah dan langsung mengalir ke sungai-sungai utama.

Kondisi ini menunjukkan bahwa bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat tidak dapat dilepaskan dari persoalan tata kelola sumber daya alam. Kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan prinsip pengurangan risiko bencana berkontribusi terhadap meningkatnya kerentanan wilayah.

Dalam konteks kebijakan publik, dampak bencana 2025 memberikan gambaran nyata mengenai tantangan implementasi kebijakan penanggulangan bencana di tingkat daerah. Meskipun kerangka regulasi nasional telah tersedia, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi keterbatasan, baik dari sisi kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas sektor, maupun sumber daya.

Pendekatan penanggulangan bencana masih cenderung reaktif, dengan fokus pada penanganan darurat dan pemulihan pascabencana. Sementara itu, upaya mitigasi struktural dan nonstruktural, seperti penataan ruang berbasis risiko, rehabilitasi daerah aliran sungai, serta edukasi kebencanaan kepada masyarakat, belum sepenuhnya optimal.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat menjadi peringatan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan daerah dalam melindungi masyarakatnya dari risiko bencana. Kerugian yang ditimbulkan oleh bencana berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah dan meningkatkan kesenjangan sosial.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa bencana banjir dan longsor yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat pada periode Desember 2024 hingga Januari 2025 memiliki dampak yang sangat serius terhadap keselamatan masyarakat, keberlanjutan sosial ekonomi, serta stabilitas pembangunan daerah. Tingginya korban jiwa, luasnya kerusakan permukiman dan lahan produktif, serta besarnya jumlah penduduk yang harus mengungsi menegaskan bahwa bencana tersebut bersifat ekstrem dan melampaui kapasitas penanganan rutin.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa besarnya dampak bencana tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan ekstrem, tetapi juga oleh kerentanan struktural wilayah, kondisi lingkungan yang terdegradasi, serta keterbatasan implementasi kebijakan penanggulangan bencana di tingkat daerah. Interaksi antara faktor geografis, tata guna lahan, dan kapasitas kelembagaan menjadi determinan utama dalam menentukan tingkat risiko dan besarnya dampak yang ditimbulkan.

Hasil kajian ini menegaskan pentingnya pergeseran paradigma penanggulangan bencana dari pendekatan yang dominan reaktif menuju strategi yang lebih preventif dan berorientasi pada pengurangan risiko. Integrasi kebijakan penataan ruang, pengelolaan lingkungan, serta penguatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat menjadi kunci untuk meminimalkan dampak

bencana serupa di masa mendatang. Dengan demikian, pengurangan risiko bencana perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat

Referensi

- Ahmad, T., Putera, R. E., & Koeswara, H. (2024). Implementasi Program Pengurangan Risiko Bencana Oleh BPBD Kabupaten Pasaman. *Journal of Social and Policy Issues*, 45-53.
- Arista, R. D. (2025). Pemodelan Sistem Informasi Geografis dalam Pemetaan Risiko Bencana Alam di Provinsi Sumatra Utara: Sistem Informasi. *Jurnal Nasional Teknologi Komputer*, 5(3), 936-945.
- Arkania, C., Putri, B. A., & Ningrum, D. P. (2025). Komunikasi Pemerintah dalam Penanganan Banjir Sumatra: Analisis Respons Publik di Media Sosial. *INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer*, 1(02).
- Aulia, C., & Meiwanda, G. (2022). Strategi Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solok Sumatera Barat. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 1(3), 35-44.
- Bahri, S. Z. (2023). Strategi Penanganan Banjir Berbasis Mitigasi Bencana Pada Kawasan Rawan Bencana Banjir: Studi kasus: Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. In *Andalas Civil Engineering (ACE) Conference* (Vol. 8, pp. 425-434).
- Berlia, S. C., & Sutiyo, S. (2025). *Mitigasi Struktural Bencana Banjir Di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat* (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Fauzan, F., Ekaputra, R., Hakam, A., & Istijono, B. (2025). Preparation of Flood Disaster Contingency Documents in Pesisir Selatan Regency, West Sumatra, as Part of Disaster Risk Reduction (Mitigation). *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(2), 573-580.
- Fauzan, F., Hakam, A., Ismail, F. A., Andriani, A., Narny, Y., & Putri, R. A. (2025). Capacity Building For The Community of Nagari Andaleh, Batipuh Sub-District, Tanah Datar District, West Sumatra Province in Dealing Disasters, Flash Floods and Earthquakes: Peningkatan Kapasitas Masyarakat Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat Dalam Menghadapi Bencana Banjir Bandang. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(4), 1251-1257.
- Firdaus, D. (2024). *Manajemen Komunikasi Bencana Galodo Sumatera Barat 2024 (Studi Kasus Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Florenita, V. (2023). *Pelaksanaan Mitigasi Bencana Banjir Di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Hia, D. P. R. (2023). *Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, MKKP).
- Maulani, T. A., & Syamsir, S. (2024). Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir di Nagari Sicincin. *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, 3(4), 420-425.

- Mu'afa, R., Sembiring, R. A. P., & Nugraha, A. D. (2025). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sikap Masyarakat Terhadap Bencana Banjir Di Pulau Sumatra. *Jurnal Moderasi Pendidikan*, 1(3), 358-363.
- Putera, R. E., Valentina, T. R., & Rosa, S. A. S. (2020). Implementasi kebijakan penataan ruang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya pengurangan resiko bencana di Kota Padang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(2), 155-167.
- Rahmadani, A. D., Maulana, M. A., & Sebayang, S. V. B. (2025). Peran Media Sosial Pasca Banjir Di Sumatera Sebagai Sarana Kepedulian Dan Solidaritas Antar Masyarakat. *Jurnal Moderasi Pendidikan*, 1(3), 341-346.
- Riadi, A., Hidayah, A. A., & Mudhofar, S. A. (2025). Ketentuan Penetapan Status Bencana Nasional Pada Kasus Longsor Dan Banjir Bandang Di Sumatra. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(2), 2821-2830.
- Sari, S. K. (2025). Effectiveness of Mobile Clinic Services in Addressing Post-Disaster Reproductive Health Needs in West Sumatra.
- Shabir, F. F., & Aziqri, M. R. (2025). Peran Pemerintah Dalam Mengambil Langkah Konkret Terhadap Penanganan Banjir Di Sumatera. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 11(9), 2421-2430.
- Supyan, A. H. S. K., Dimyati, F. K. A., Assalma, R. A. B., Besrolia, S. M., & Nurmaeshi, S. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pencegahan Deforestasi Di Sumatra Pasca Bencana Banjir Bandang 2025. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(2), 1821-1830.
- Susmini, S., Wijaya, S., Soewito, B., Wibowo, W. D. A., & Dahliana, D. (2024). Pelatihan Manajemen Bencana Dengan Table Top Disaster Simulation: Perintisan Desa Siaga Bencana di Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan: Disaster Management Training Using Table Top Disaster Simulation: a Disaster Preparedness Village Pioneer in Musi Rawas Regency, South Sumatra. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(9), 1643-1648.
- Tasman, H. T. (2022). *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Pencegahan Bencana Banjir di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Zein, A. W., Sari, D., Parinduri, A. R., Ningsih, I. W. I., & Nasution, A. H. (2025). Peran Pemerintah dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan dan Eskalasi Kerugian Ekonomi Akibat Banjir di Sumatra. *JURNAL AKADEMIK EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 2(4), 834-841.